



**GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF  
JAKARTAB**

**PERATURAN GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF  
JAKARTAB**

NOMOR 111 TAHUN 2016

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF JAKARTAB,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan kebutuhan pegawai dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 234 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 234 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN KEHUMASAN.**

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas pada SKPD/UKPD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UKPD.
13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.



14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

##### Analisis Jabatan

###### Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan lebih tepat dan akurat.
- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

#### Bagian Kedua

##### Analisis Beban Kerja

###### Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan PNS berdasarkan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

## BAB III

## KEGUNAAN

## Pasal 4

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk :
  - a. perencanaan kebutuhan PNS;
  - b. rekrutmen calon PNS;
  - c. penempatan PNS;
  - d. pengendalian PNS;
  - e. pendidikan dan pelatihan PNS;
  - f. pengembangan PNS; dan
  - g. kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya oleh :
  - a. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan;
  - b. BKD;
  - c. Badan Diklat; dan
  - d. Biro ORB.

## BAB IV

## RUANG LINGKUP

## Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
  - a. nama jabatan;
  - b. kode jabatan;
  - c. unit organisasi;
  - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
  - e. ikhtisar jabatan;
  - f. uraian tugas;
  - g. bahan kerja;
  - h. perangkat/alat kerja;
  - i. hasil kerja;
  - j. tanggung jawab;
  - k. wewenang;
  - l. korelasi jabatan;
  - m. kondisi lingkungan kerja;
  - n. risiko bahaya;
  - o. syarat jabatan;
  - p. prestasi yang diharapkan; dan
  - q. butir informasi lain.

- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penerapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan setelah mendapat validasi dari Biro ORB.

## BAB V

### KEWENANGAN

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro ORB.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak lain.

## BAB VI

### MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 7

- (1) Biro ORB melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan penempatan pegawai dalam jabatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan dilaksanakan oleh BKD dan Biro ORB.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro ORB dapat berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 April 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 62084

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 111 TAHUN 2016  
Tanggal 29 April 2016

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Keterangan
		Jabatan Pimpinan	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kepala Dinas	1					
2.	Sekretaris Dinas		1				
	a. Kepala Subbagian Umum			1			
	1) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	2) Penyimpan Barang				1		
	3) Pengelola Umum				1		
	4) Pengadministrasi Pimpinan				3		
	5) Pengadministrasi Umum				3		
	6) Penyiap Berkas				1		
	b. Kepala Subbagian Kepegawaian			1			
	1) Pengelola Kepegawaian				2		
	2) Pengadministrasi Kepegawaian				3		
	c. Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran			1			
	1) Pengelola Perencanaan dan Anggaran				2		
	2) Pengolah Perencanaan dan Anggaran				2		
	d. Kepala Subbagian Keuangan			1			
	1) Bendaharawan				1		
	2) Pengolah Data Keuangan				2		
	3) Verifikator				1		
	4) Pengadministrasi Keuangan				1		
3.	Kepala Bidang Kehumasan		1				
	a. Kepala Seksi Analisa dan Monitoring Berita			1			
	1) Analis Berita				3		
	2) Pengadministrasi Berita				2		
	b. Kepala Seksi Kemitraan dan Kerjasama Kehumasan			1			
	1) Pengelola Kemitraan dan Kerjasama Kehumasan				2		

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Keterangan
		Jabatan Pimpinan	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Pengadministrasi Kemitraan dan Kerjasama Kehumasan				2		
	c. Kepala Seksi Dokumentasi dan Publikasi			1			
	1) Pengelola Dokumentasi & Publikasi				2		
	2) Pengolah Dokumentasi dan Publikasi				6		
	3) Pengadministrasi Dokumentasi dan Publikasi				1		
	4) Petugas Peliputan				1		
	5) Petugas Kameramen				1		
4	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik		1				
	a. Kepala Seksi Informasi Publik			1			
	1) Pengelola Informasi Publik				2		
	2) Pemroses Informasi Publik				2		
	3) Pengadministrasi Informasi Publik				1		
	b. Kepala Seksi Penerbitan dan Media Luar Ruang			1			
	1) Pengelola Penerbitan dan Media Luar Ruang				2		
	2) Pengadministrasi Penerbitan dan Media Luar Ruang				2		
	c. Kepala Seksi Data dan Informasi			1			
	1) Pengelola Data dan Informasi				4		
	2) Pengadministrasi Data dan Informasi				2		
	3) Caraka				1		
5	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi		1				
	a. Kepala Seksi Dukungan Teknis Pusat Data dan Perangkat Teknologi Informasi			1			
	1) Pengelola Dukungan Teknis Pusat Data dan Perangkat Teknologi Informasi				4		
	2) Pengadministrasi Dukungan Teknis Pusat Data dan Perangkat Teknologi Informasi				1		
	b. Kepala Seksi Operasi Pusat Data dan Perangkat Teknologi Informasi			1			
	1) Pengelola Operasi Pusat Data dan Perangkat Teknologi				6		
	2) Pemroses Operasi Pusat Data dan Perangkat Teknologi				5		
	3) Penyusun Operasi Pusat Data dan Perangkat Teknologi				3		
	4) Pengadministrasi Operasi Pusat Data dan Perangkat Teknologi Informasi				1		

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Keterangan
		Jabatan Pimpinan	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
	c. Kepala Seksi Pemeliharaan Pusat Data dan Perangkat Teknologi Informasi			1			
	1) Pengelola Pemeliharaan Pusat Data dan Perangkat Teknologi				2		
	2) Teknisi Pemeliharaan Pusat Data dan Perangkat Teknologi Informasi				5		
	3) Pengadministrasi Pemeliharaan Pusat Data dan Perangkat Teknologi Informasi				3		
6	Kepala Bidang Sistem Informasi Manajemen		1				
	a. Kepala Seksi Sistem Informasi Manajemen Pembangunan, Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan			1			
	1) Analis Sistem Informasi Manajemen Pembangunan, Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan				3		
	2) Pengelola Sistem Informasi Manajemen Pembangunan, Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan				3		
	3) Pemroses Sistem Informasi Manajemen Pembangunan, Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan				3		
	4) Pengadministrasi Sistem Informasi Manajemen Pembangunan, Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan				1		
	5) Pranata Komputer Pertama (JFT)				4		
	b. Kepala Seksi Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan, Keuangan dan Perekonomian			1			
	1) Analis Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan, Keuangan dan Perekonomian				4		
	2) Pengelola Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan, Keuangan dan Perekonomian				4		
	3) Pemroses Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan, Keuangan dan Perekonomian				4		
	4) Pengadministrasi Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan, Keuangan dan Perekonomian				1		
	5) Pranata Komputer Pertama (JFT)				5		
	c. Kepala Seksi Basis Data dan Perangkat Lunak Aplikasi			1			
	1) Analis Basis Data dan Perangkat Lunak Aplikasi				3		
	2) Pengelola Basis Data dan Perangkat Lunak Aplikasi				4		
	3) Pengadministrasi Basis Data dan Perangkat Lunak Aplikasi				1		
7	Kepala Bidang Jaringan Teknologi Komunikasi		1				

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Keterangan
		Jabatan Pimpinan	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
	a. Kepala Seksi Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Teknologi Komunikasi			1			
	1) Pengelola Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Teknologi Komunikasi				2		
	2) Teknisi Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Teknologi Komunikasi				2		
	3) Pengadministrasi Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Teknologi Komunikasi				1		
	b. Kepala Seksi Layanan dan Dukungan Jaringan Teknologi Komunikasi			1			
	1) Pengelola Layanan dan Dukungan Jaringan Teknologi Komunikasi				2		
	2) Teknisi Layanan dan Dukungan Jaringan Teknologi Komunikasi				4		
	3) Pengadministrasi Layanan dan Dukungan Jaringan Teknologi Komunikasi				1		
	c. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengamanan Jaringan Teknologi Komunikasi			1			
	1) Pengelola Pengendalian dan Pengamanan Jaringan Teknologi Komunikasi				3		
	2) Teknisi Pengendalian dan Pengamanan Jaringan Teknologi Komunikasi				2		
	3) Pengadministrasi Pengendalian dan Pengamanan Jaringan Teknologi Komunikasi				1		
8	Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi		1				
	a. Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi			1			
	1) Pengelola Pos dan Telekomunikasi				2		
	2) Pengolah Pos dan Telekomunikasi				1		
	3) Teknisi Pos dan Telekomunikasi				3		
	4) Pengadministrasi Pos dan Telekomunikasi				1		
	b. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Telekomunikasi			1			
	1) Analis Prasarana dan Sarana Telekomunikasi				2		
	2) Pengelola Prasarana dan Sarana Telekomunikasi				2		
	3) Teknisi Prasarana dan Sarana Telekomunikasi				2		
	4) Pegadministrasi Prasarana dan Sarana Telekomunikasi				1		
	c. Kepala Seksi Multimedia			1			
	1) Pengelola Multimedia				6		
	2) Teknisi Multimedia				6		



No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Keterangan
		Jabatan Pimpinan	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
	3) Perngadministrasi Multimedia				1		
9	Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Kota Administrasi Jakarta Pusat		1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	1) Bendaharawan				1		
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	3) Verifikator				1		
	4) Pengolah Umum				4		
	b. Kepala Seksi Kehumasan			1			
	1) Pengelola Kehumasan				3		
	2) Pengolah Kehumasan				4		
	3) Pengadministrasi Kehumasan				3		
	c. Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi			1			
	1) Pengelola Infrastruktur Teknologi Informasi				2		
	2) Pengolah Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi				2		
	3) Teknisi Infrastruktur Teknologi Informasi				4		
	4) Pengadministrasi Infrastruktur Teknologi Informasi				1		
	5) Pranata Komputer Pertama (JFT)				2		
	d. Kepala Seksi Sistem Informasi			1			
	1) Analis Sistem Informasi				1		
	2) Pengelola Sistem Informasi				2		
	3) Pengadministrasi Sistem Informasi				1		
	4) Pranata Komputer Pertama (JFT)				2		
	e. Kepala Seksi Pos, Telekomunikasi dan Multimedia			1			
	1) Pengelola Pos, Telekomunikasi dan Multimedia				3		
	2) Teknisi Pos, Telekomunikasi dan Multimedia				3		
	3) Pengadministrasi Pos, Telekomunikasi dan Multimedia				1		
10	Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Kota Administrasi Jakarta Utara		1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	1) Bendaharawan				1		
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	3) Verifikator				1		
	4) Pengolah Umum				4		
	b. Kepala Seksi Kehumasan			1			
	1) Pengelola Kehumasan				3		
	2) Pengolah Kehumasan				4		
	3) Pengadministrasi Kehumasan				1		

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Keterangan
		Jabatan Pimpinan	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
	c. Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi			1			
	1) Pengelola Infrastruktur Teknologi Informasi				2		
	2) Pengolah Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi				2		
	3) Teknisi Infrastruktur Teknologi Informasi				4		
	4) Pengadministrasi Infrastruktur Teknologi Informasi				1		
	5) Pranata Komputer Pertama (JFT)				2		
	d. Kepala Seksi Sistem Informasi			1			
	1) Analis Sistem Informasi				1		
	2) Pengelola Sistem Informasi				2		
	3) Pengadministrasi Sistem Informasi				1		
	4) Pranata Komputer Pertama (JFT)				2		
	e. Kepala Seksi Pos, Telekomunikasi dan Multimedia			1			
	1) Pengelola Pos, Telekomunikasi dan Multimedia				3		
	2) Teknisi Pos, Telekomunikasi dan Multimedia				3		
	3) Pengadministrasi Pos, Telekomunikasi dan Multimedia				1		
11	Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Kota Administrasi Jakarta Barat		1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	1) Bendaharawan				1		
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	3) Verifikator				1		
	4) Pengolah Umum				4		
	b. Kepala Seksi Kehumasan			1			
	1) Pengelola Kehumasan				3		
	2) Pengolah Kehumasan				4		
	3) Pengadministrasi Kehumasan				1		
	c. Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi			1			
	1) Pengelola Infrastruktur Teknologi Informasi				2		
	2) Pengolah Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi				2		
	3) Teknisi Infrastruktur Teknologi Informasi				4		
	4) Pengadministrasi Infrastruktur Teknologi Informasi				1		
	5) Pranata Komputer Pertama (JFT)				2		
	d. Kepala Seksi Sistem Informasi			1			
	1) Analis Sistem Informasi				1		
	2) Pengelola Sistem Informasi				2		
	3) Pengadministrasi Sistem Informasi				1		
	4) Pranata Komputer Pertama (JFT)				2		
	e. Kepala Seksi Pos, Telekomunikasi dan Multimedia			1			

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Keterangan
		Jabatan Pimpinan	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1) Pengelola Pos, Telekomunikasi dan Multimedia				3		
	2) Teknisi Pos, Telekomunikasi dan Multimedia				3		
	3) Pengadministrasi Pos, Telekomunikasi dan Multimedia				1		
12	Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Kota Administrasi Jakarta Selatan		1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	1) Bendaharawan				1		
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	3) Verifikator				1		
	4) Pengolah Umum				4		
	5) Caraka				1		
	b. Kepala Seksi Kehumasan			1			
	1) Pengelola Kehumasan				3		
	2) Pengolah Kehumasan				3		
	3) Pengadministrasi Kehumasan				1		
	4) Petugas Peliputan				1		
	c. Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi			1			
	1) Pengelola Infrastruktur Teknologi Informasi				2		
	2) Pengolah Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi				2		
	3) Teknisi Infrastruktur Teknologi Informasi				4		
	4) Pengadministrasi Infrastruktur Teknologi Informasi				1		
	5) Pranata Komputer Pertama (JFT)				2		
	d. Kepala Seksi Sistem Informasi			1			
	1) Analisis Sistem Informasi				1		
	2) Pengelola Sistem Informasi				2		
	3) Pengadministrasi Sistem Informasi				1		
	4) Pranata Komputer Pertama (JFT)				2		
	e. Kepala Seksi Pos, Telekomunikasi dan Multimedia			1			
	1) Pengelola Pos, Telekomunikasi dan Multimedia				3		
	2) Teknisi Pos, Telekomunikasi dan Multimedia				3		
	3) Pengadministrasi Pos, Telekomunikasi dan Multimedia				1		
13	Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Kota Administrasi Jakarta Timur		1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	1) Bendaharawan				1		
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	3) Verifikator				1		
	4) Pengolah Umum				4		



No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Keterangan
		Jabatan Pimpinan	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
	b. Kepala Seksi Kehumasan			1			
	1) Pengelola Kehumasan				3		
	2) Pengolah Kehumasan				3		
	3) Pengadministrasi Kehumasan				1		
	4) Petugas Peliputan				1		
	5) Penyiap Berkas				1		
	c. Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi			1			
	1) Pengelola Infrastruktur Teknologi Informasi				2		
	2) Pengolah Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi				2		
	3) Teknisi Infrastruktur Teknologi Informasi				4		
	4) Pengadministrasi Infrastruktur Teknologi Informasi				1		
	5) Pranata Komputer Pertama (JFT)				2		
	d. Kepala Seksi Sistem Informasi			1			
	1) Analis Sistem Informasi				1		
	2) Pengelola Sistem Informasi				2		
	3) Pengadministrasi Sistem Informasi				1		
	4) Pranata Komputer Pertama (JFT)				2		
	e. Kepala Seksi Pos, Telekomunikasi dan Multimedia			1			
	1) Pengelola Pos, Telekomunikasi dan Multimedia				3		
	2) Teknisi Pos, Telekomunikasi dan Multimedia				3		
	3) Pengadministrasi Pos, Telekomunikasi dan Multimedia				1		
14	Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	1) Bendaharawan				1		
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	3) Verifikator				1		
	4) Pengolah Umum				3		
	b. Kepala Seksi Kehumasan			1			
	1) Pengelola Kehumasan				3		
	2) Pengolah Kehumasan				4		
	3) Pengadministrasi Kehumasan				1		
	c. Kepala Seksi Sistem Informasi, Infrastruktur Teknologi Informasi, Pos, Telekomunikasi dan Multimedia			1			
	1) Pengelola Sistem Informasi, Infrastruktur Teknologi Informasi, Pos, Telekomunikasi dan Multimedia				5		
	2) Teknisi Sistem Informasi, Infrastruktur Teknologi Informasi, Pos, Telekomunikasi dan Multimedia				4		
	3) Pengadministrasi Sistem Informasi, Infrastruktur Teknologi Informasi, Pos, Telekomunikasi dan Multimedia				1		



No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Keterangan
		Jabatan Pimpinan	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
	4) Pranata Komputer Pertama (JFT)				2		
15	Kepala Unit Layanan Pelayanan Secara Elektronik		1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	1) Bendaharawan				1		
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	3) Verifikator				1		
	4) Pengolah Perencanaan dan Anggaran				1		
	5) Pengadministrasi Umum				1		
	b. Kepala Satuan Pelaksana Registrasi dan Verifikasi				1		
	1) Pengolah Registrasi dan Verifikasi				4		
	2) Pengadministrasi Registrasi dan Verifikasi				1		
	c. Kepala Satuan Pelaksana layanan dukungan				1		
	1) Pemroses layanan dukungan				3		
	2) Pengadministrasi layanan dukungan				1		
16	Kepala Unit Pelaksana Teknis Jakarta Smart City		1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	1) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	2) Bendaharawan				1		
	3) Verifikator				1		
	4) Pengolah Perencanaan dan Anggaran				1		
	5) Pengadministrasi Jakarta Smart City				2		
	b. Kepala Satuan Pelaksana Operasional Command Center				1		
	1) Pengolah Operasional Command Center				3		
	2) Pengadministrasi Operasional Command Center				1		
	c. Kepala Satuan Pelaksana Penelitian dan Pengembangan				1		
	1) Pengolah Penelitian dan Pengembangan				3		
	2) Pengadministrasi Penelitian dan Pengembangan				1		
17	Kepala Sekretariat Penyiaran dan Komisi Informasi		1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	1) Bendaharawan				1		
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	3) Verifikator				1		
	4) Pengolah Perencanaan dan Anggaran				1		
	5) Pengolah Data				1		
	6) Pengadministrasi Umum				1		
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pelaksana Informasi Provinsi				1		
	1) Pengolah Informasi Provinsi				3		
	2) Pengadministrasi Informasi Provinsi				1		

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Keterangan
		Jabatan Pimpinan	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
	c. Kepala Satuan Pelaksana Penyiaran				1		
	1) Pengolah Penyiaran				3		
	2) Pengadministrasi Penyiaran				1		
	Jumlah	1	16	53	448	0	0
	Jumlah Total	518					

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA